

MenPANRB: Tak Ada ASN Muda yang Keberatan Dimutasi ke IKN, Banyak yang Ingin

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah mengungkap banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) muda yang tak keberatan dimutasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut dia, tingginya minat ASN untuk mutasi ke IKN dikarenakan hidup di Ibu Kota baru lebih tenang tanpa kemacetan dan polusi udara di sana lebih sehat. Sampai saat ini sih nggak ada yang nggak mau ya justru yang pengen pindah anak muda banyak ya, kata Azwar Anas saat ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3). Hingga sampai ini Anas mengatakan belum ada ASN yang menolak dipindahkan ke IKN. Ia mengatakan 20.000 penduduk akan disimulasikan untuk pindah ke IKN. Dari jumlah tersebut, 11.000 adalah ASN dan sisanya adalah tenaga dari HANKA. Nah ini kita simulasikan, semula ada skenario 6.000 kalau 6.000 kan terlalu sepi, maka bapak presiden meminta ditambah termasuk skenario 20.000. Ketemu lah skenario 16.000-an di mana 11.000-nya adalah ASN, selebihnya adalah tenaga dari hanka, ujar Anas. Selain itu, Anas mengatakan bahwa ASN yang didahulukan mutasi ke IKN bukan hanya ASN yang belum berkeluarga atau single. Anas justru mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan fasilitas untuk keluarga ASN seperti sekolah dan pusat perbelanjaan. Maka justru yang kami sampaikan kepada Otorita IKN dan Gubernur DKI kemarin bagaimana sekolah yang diperintahkan Presiden itu segera ada di sana, tutur Anas. Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan, tengah disiapkan 16 ribu rumah untuk ASN yang akan pindah. Menurut Dhony, hunian tersebut akan disiapkan lebih dahulu untuk ASN yang belum berkeluarga atau single. "Kemungkinan kan yang datang, kan, misalnya kalau keluarga itu mikir sekolah anaknya, sekolah, kan, semester berikutnya atau apa, kita perhitungkan 50 persen yang single dulu yang pindah dan itu akan sharing," kata Dhony usai menghadap Jokowi di Istana Negara, Rabu (8/3). Dhony memperkirakan, satu unit dengan tipe yang paling kecil bisa memuat tiga kamar. Ketiga kamar itu bisa dipakai oleh ASN yang single untuk sharing atau tinggal bersama. Sementara untuk rumah dinas jabatan tidak gratis. Dhony mengatakan, mekanisme kepemilikan rumah dinas jabatan sudah diatur di Perpres

terkait hunian yang akan dibangun di sekitar Istana atau kantor kementerian/lembaga.